



**INFO ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

**KEGIATAN
09 NOVEMBER – 10 DESEMBER 2020**



BADAN KEAHLIAN DPR RI

***BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”***

**INFO ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	KOMISI I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan di tingkat Panja RUU tentang Perlindungan Data Pribadi akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. 2. Rekomendasi Panja pengawasan informasi dan ICT dalam masa pandemi Covid-19 serta Rekomendasi Panja perlindungan WNI dan kinerja perwakilan di luar negeri terkait pandemi global Covid-19 telah diterima oleh rapat intern Komisi I dan selanjutnya menjadi rekomendasi Komisi I kepada Mitra Kerja Komisi I DPR. 3. Isi Rekomendasi, yaitu berkaitan dengan aspek infrastruktur TIK yang terbatas; aspek kuantitas SDM Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang masih terbatas dan Ekosistem Digital yang belum memadai; aspek anggaran; aspek regulasi; serta aspek kelembagaan Kemkominfo sebagai Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 4. Rekomendasi Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait pandemi global Covid-19, yaitu mendorong Kemlu untuk terus meningkatkan pelindungan WNI di LN dan untuk terus meningkatkan upaya diplomasi vaksin dalam setiap pertemuan internasional; meminta Perwakilan RI di LN untuk tetap mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya yang sudah baik dalam penanganan dan pelindungan WNI di LN pada masa pandemi Covid-19; mendorong koordinasi sinergis antara TNI dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pengetatan pengawasan titik perlintasan batas antarnegara; dan meminta Kemlu, Mabes TNI AD dan AL untuk menyusun secara cermat kebutuhan alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 guna mengantisipasi kemungkinan adanya pandemi Covid-19 gelombang kedua, ketiga, dan berikutnya

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>5. Panja pemenuhan kesejahteraan prajurit TNI tahun 2020 akan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Intern Komisi I.</p> <p>6. Komisi I DPR RI telah menerima Surat dari Pimpinan DPR RI mengenai salinan Kepres RI Nomor 105/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 terkait dengan telah ditetapkan pemberhentian sebagai Anggota Dewas LPP TVRI atas nama Sdr Arief Hidayat Thamrin. Komisi I DPR RI akan membahasnya dalam Rapat Intern terdekat.</p>
2.	KOMISI II	<p>1. Saat ini harmonisasi dan sinkronisasi RUU tentang Pemilu menunggu hasil rapat Baleg DPR.</p> <p>2. Hasil rapat dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, DKPP, dan gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Peraturan KPU yang dibahas antara lain: 1) Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 2) Perubahan atas PKPU No.9 Tahun 2018 3) Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2015. b. Komisi II DPR RI merasa perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid-19. Hal ini penting dilakukan mengingat terdapat berbagai temuan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di tahapan pilkada serta pelanggaran netralitas ASN. Berbagai pelanggaran yang terjadi harus mendapatkan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku. c. Terhadap perbedaan data kependudukan dan data pemilih pilkada serentak 2020. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk menjamin warga negara yang sudah melakukan perekaman KTP el dan yang belum masuk dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya. <p>3. Hasil Rapat kerja dengan Kemenpan RB terkait evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK serta pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021. Menerima masukan dari beberapa organisasi dan kelompok masyarakat antara lain:</p>

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia, menyampaikan aspirasi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan Kementerian PANRB melalui SKB 3 Menteri kepada ASN yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. b. Perhimpunan Karya PNS, menyampaikan aspirasi tentang ASN yang mengalami “pembunuhan karier” karena tidak mendukung kepala daerah yang kemudian menang. Akibatnya, mereka dinonjobkan atau dinonaktifkan tanpa kejelasan. c. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perkumpulan Honorar K2 Indonesia (PHK2I), menyampaikan aspirasi tentang usulan ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga administrasi dalam pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021. d. Komunitas Tenaga Kesehatan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Kepulauan (DPTK), menyampaikan aspirasi tentang usulan ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga kesehatan selain dokter dan bidan dalam pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021. <p>4. Hasil rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Aceh terkait penyusunan rancangan qanun Aceh tentang pertanahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meminta kewenangan BPN pusat seluruhnya ditarik ke daerah sehingga BPN diubah menjadi BPA. b. Terkait status ex GAM yang saat ini masih menjadi tahanan politik. Dalam qanun mengatur tentang pembagian tanah seluas masing-masing 2 hektar. c. Status tanah adat yang belum jelas perlu kepastian wilayah hutan di mana yang termasuk wilayah hutan nasional dan wilayah hutan adat.
3.	KOMISI III	<p>1. Pada masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Baleg masih melakukan harmonisasi atas RUU tentang Kejaksaan karena masih ada beberapa hal secara substansi dan teknis yang akan dibahas oleh Baleg.</p>

NO.	AKD	<p style="text-align: center;">SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN</p>
		<p>2. Sampai sidang masa persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Baleg belum memberikan hasil harmonisasi RUU tentang Penyardapan.</p> <p>3. Berdasarkan Keputusan Rapat Internal Komisi III DPR RI 10 November 2020:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pada masa persidangan II Tahun 2020-2021 Komisi III tidak melaksanakan kegiatan fungsional legislasi, karena masa sidang II Tahun sidang 2020-2021 yang sangat singkat.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Komisi III akan melaksanakan fungsi legislasi pada masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, termasuk tindak lanjut RUU <i>carry over</i> RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan.</p> <p>4. Rapat kerja dengan Kapolri akan dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.</p> <p>5. Rapat kerja dengan Jaksa Agung akan dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.</p> <p>6. Tanggal 3 Desember 2020, Komisi III DPR RI melaporkan perkembangan proses Pembahasan Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2021 dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus dan diputuskan bahwa jadwal Pemberian Persetujuan atas 7 orang Calon Anggota Komisi Yudisial dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2020.</p> <p>7. Tanggal 7 Desember 2020 Pimpinan Komisi III melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Yudisial pada Rapat Paripurna dan diputuskan bahwa DPR RI menyetujui 7 orang Calon Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025.</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Dr. Joko Sasmito, SH., MH.</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Drs. M. Taufik HZ, MHI.</p> <p style="margin-left: 20px;">3) Binziad Kadafi, SH., L.LM. Ph.D.</p> <p style="margin-left: 20px;">4) Sukma Violetta, SH., MH.</p> <p style="margin-left: 20px;">5) Prof. Amzulian Rifai, SH., L.LM., Ph.D.</p> <p style="margin-left: 20px;">6) Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SH., M.Hum.</p>

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
		7) Dr. Siti Nurdjanah, SH., MH.
4.	KOMISI IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IV DPR RI menyampaikan Surat ke Badan Legislasi dengan Nomor 99/KOM IV/DPR RI/XI/2020 tanggal 20 November 2020. disertai Draft RUU dan Naskah Akademik agar UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk diusulkan dalam prolegnas Prioritas Tahun 2021. 2. RDPU Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura (11 Nov 2020), RDP Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura (16 Nov 2020), RDP Kebijakan Ketahanan Pangan (17 Nov 2020). Butir penting dalam ketiga rapat tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV mendapatkan informasi dari asosiasi dan KADIN mengenai sulitnya konsumen/perusahaan mendapatkan pasokan hortikultura lokal, sehingga harus dipenuhi melalui impor dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Salah satu penyebab kurangnya pasokan lokal adalah masalah ketersediaan lahan. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan impor, serta memiliki <i>mapping</i> produk hortikultura, dan pendataan produk pertanian yang rapi dan valid, salah satunya dengan memiliki <i>dashboard</i> yang digunakan untuk melaporkan dan mendata produk pertanian. 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menata ulang kebijakan dan regulasi hortikultura serta mereformulasi kebijakan impor produk hortikultura sejak dari penerbitan RIPH yang berdasarkan pada kebutuhan maupun kriteria teknis dalam negeri. Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian mereformulasi kebijakan wajib tanam bawang putih menjadi kewajiban pemberian bibit/benih unggul kepada petani, sejalan dengan komposisi kebutuhan pengembangannya. 3) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan food estate sesuai potensi, daya dukung, daya tampung, sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah.

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. RDP dan RDPU Panja Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (11 Nov 2020) dan RDP Kebijakan Ketahanan Pangan (17 Nov 2020) dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia Holding Company, Kemenko Perekonomian, Himbara, HKTI, KTNA, dan Asosiasi Distributor Pupuk. Butir penting dalam kedua rapat tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petani belum seluruhnya masuk dan membentuk kelompok tani, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Kartu Tani dan menyebabkan petani tersebut tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi. 2) Pendistribusian pupuk belum dapat memenuhi 6 tepat akibat adanya pemotongan alokasi pupuk sehingga waktu pengiriman untuk tambahan alokasi pupuk, berjalan sangat terlambat 3) Permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan Kartu Tani, diantaranya susah sinyal, EDC belum seluruhnya tersalurkan di kios, masih adanya <i>blankspot</i> di beberapa lokasi, dan Himbara belum selesai dalam pembuatan Kartu Tani 4) Data kebutuhan pupuk dan pendistribusian pupuk bersubsidi di lapangan masih bermasalah 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang kebijakan Kartu Tani dan melakukan evaluasi E-RDCK penerima pupuk bersubsidi
5.	KOMISI V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah dilakukan di Baleg tanggal 11 Nov 2020 dan selesai 25 Nov 2020, dengan hasil seluruh fraksi di Baleg menyetujui RUU Perubahan Kedua atas UU No 38 Tentang Jalan dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI. Rapat Bamus tanggal 03 Desember 2020. Dan telah disetujui Rapat Paripurna untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI. 2. Pada saat Raker pengawasan dengan Menteri Perhubungan (17/11/2020), Menteri Perhubungan mengajukan rekomposisi pagu anggaran Kemenhub pada Unit Kerja Eselon I dalam APBN TA 2021, dari Rp. 45,66 T antara lain karena rekomposisi gaji (pengurangan belanja gaji dan operasional), dan mengcover kegiatan <i>by the servis</i> BPTJ (contoh

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>penyediaan bus karena overloaded KA). Terlaksana bersamaan dengan rapat evaluasi APBN TA 2020 tanggal 17 Nov 2020.</p> <p>3. Raker dengan Menteri Perhubungan tentang Evaluasi APBN TA 2020 dan penyampaian Laporan Kunker Tahun 2020, menyoroti antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan realisasi dan penyerapan anggaran TA 2020, utamanya yang memberikan stimulus bagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19, antara lain Program Padat Karya Sektor Transportasi, peningkatan keselamatan dan keamanan di simpul-simpul transportasi. b. Menyetujui rekomposisi pagu anggaran Kemenhub dalam APBN TA 2021. <p>4. Raker dengan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Evaluasi APBN TA 2020 dan penyampaian Laporan Kunker Tahun 2020 menyoroti antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan desa wisata, pembangunan jalan kawasan perdesaaan, fasilitasi pengembangan dan kerjasama BUMDes, serta pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi. b. Akan mengagendakan Rakergab dengan K/L lainnya terkait Penggunaan Dana Desa. <p>5. Proses pemberian persetujuan kepada 7 (tujuh) nama dari 14 nama Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang diserahkan Kementerian PUPR, dilakukan dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada publik (media massa) untuk menerima aspirasi masyarakat, kemudian mengadakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 13 Calon, karena 1 Calon mengundurkan diri, dan berhasil menyetujui 7 (tujuh) nama sebagai Calon Anggota Pengurus LPJK 2021-2024. Penugasan Pimpinan DPR RI diterima tanggal 26 November 2020. Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan digelar tanggal 01 Desember 2020, dan pengambilan keputusan digelar tanggal 02 Desember 2020.</p>

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
6.	KOMISI VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Permasalahan Jiwasyra Komisi VI DPR RI menyerahkan laporan rekomendasi kepada Menteri BUMN. Rekomendasi berupa skema, konsep dan <i>timeline</i> restrukturisasi dan penyelamatan polis Jiwasyra. 2. Penyampaian kondisi aktual BUMN termasuk penjelasan roadmap dan restrukturisasi BUMN 2020-2024. Masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
7.	KOMISI VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VII telah menerima semua masukan yang berkaitan dengan RUU tentang EBT antara lain dari Dirut PLN, Dirut PT Pertamina Geothermal Energy, Dirut PT LEN Energi, Apronuki, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor UI, dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November. 2. Hasil rapat kerja dengan Kementerian ESDM: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsistensi pembuatan peraturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Percepatan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan batubara menjadi DME sebagai pengganti LPG c. Dorongan agar pemerintah tetap mempertahankan DMO batubara. d. Kajian ekonomi dan manfaat pembangunan <i>smelter</i> di Indonesia. 3. Hasil rapat kerja dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu: <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan realisasi Dana Abadi Penelitian Tahun 2019 dan Dana Abadi Litbangjirap Tahun 2020. b. Desakan agar Pemerintah segera menerbitkan Perpres tentang kelembagaan BRIN. 4. Penugasan khusus Uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025 sudah selesai dilaksanakan dari tanggal 10 November 2020 sampai dengan 12 November 2020.

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
8.	KOMISI VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana dilaksanakan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021. 2. Proses penyusunan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah selesai di komisi dan telah diserahkan ke Baleg untuk harmonisasi dan sinkronisasi. 3. Komisi VIII dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. 4. Pembahasan Kebijakan Haji tahun depan menunggu surat resmi Kerajaan Saudi Arabia.
9.	KOMISI IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja akan melakukan penyempurnaan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. 2. Hasil rapat dengan Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan BPJS Kesehatan kesimpulannya Kelas standar dan pelayanan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) sesuai UU SJSN akan ditindaklanjuti di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. 3. Hasil rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu pengawasan terkait mitigasi dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan akan terus diagendakan di MP III TS 2020-2021.

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
10	KOMISI X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) telah menyelesaikan draf RUU SKN pada 3 Desember 2020 untuk disetujui Komsii X DPR RI dan disampaikan ke Baleg DPR RI. 2. RUU SKN ditargetkan menjadi RUU inisiatif DPR RI pada akhir Masa Sidang II 2020-2021 3. Hasil rapat terkait pembahasan realisasi APBN Tahun 2020 pada masing-masing kementerian dan lembaga yaitu dengan Kemenpora, Kemendikbud, Kemenparekraf, dan Perpustakaan Nasional RI. <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan daya serap anggaran pada APBN TA 2020 sesuai target yaitu sebesar 97,21% dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, mengingat per 14 November 2020 baru mencapai 62,21 %. 2) Menekankan kepada Kemendikbud RI bahwa semua kebijakan turunan Merdeka Belajar harus menjadikan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan hukum yang utuh pada setiap pasal yang menjadi acuannya. 3) mendesak Kemendikbud RI untuk secara berkelanjutan berkoordinasi dengan Kemendagri RI, Kemenkeu RI, KemenPAN RB RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan guru eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK. 4) mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memastikan target realisasi pada akhir desember 2020 sebesar 93.91%. 5) Mendorong Perpusnas RI melakukan sinergi dan kolaborasi dengan K/L lain, untuk memperluas jangkauan dan layanan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peningkatan budaya gemar membaca, termasuk kolaborasi dengan Kemendikbud RI dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh.
11	KOMISI XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI menyampaikan surat ke Badan Legislasi dengan Nomor: 086/MS.I/KOM XI/XI/2020 tanggal 17 November 2020 disertai Draft RUU dan Naskah Akademik agar RUU tentang Reformasi, Pengembangan, dan Penguatan Sektor Keuangan untuk diusulkan dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebagai RUU Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI.

NO.	AKD	<p style="text-align: center;">SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN</p>
		<p>2. Komisi XI DPR RI menyampaikan surat ke Badan Legislasi dengan Nomor : 094/MS.II/KOM XI/XI/2020 tanggal 24 November 2020 disertai Draft RUU dan Naskah Akademik RUU tentang Reformasi, Pengembangan, dan Penguatan Sektor Keuangan untuk diharmonisasi di Badan Legislasi.</p> <p>3. Komisi XI DPR RI menyampaikan surat ke Badan Legislasi dengan Nomor : 066/MS.I/KOM XI/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan mengusulkan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk diusulkan dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebagai RUU Usul Pemerintah.</p> <p>4. Pembahasan Panja Penerimaan RATBI 2021 sudah selesai, namun pembahasan Panja Pengeluaran RATBI 2021 belum selesai sehingga belum bisa dijadwalkan Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia untuk Pengambilan Keputusan RATBI Tahun 2021.</p> <p>5. Panja Rencana Kerja Anggaran (RKA) OJK dibagi menjadi dua, yaitu Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran. Pembahasan Panja RKA OJK Tahun 2021 sudah selesai dan akan dijadwalkan untuk Rapat Kerja dengan Ketua DK OJK untuk Pengambilan Keputusan mengenai RKA OJK Tahun 2021.</p> <p>6. Rapat dengan Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS terkait progress realisasi pelaksanaan APBN 2020, program pemulihan ekonomi nasional/PEN, dan perkembangan stabilitas sistem keuangan, Komisi XI DPR RI menerima laporan realisasi APBN 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Stabilitas Sistem Keuangan yang akan menjadi bahan pengawasan Komisi XI DPR RI.</p> <p>7. Komisi XI DPR RI telah melakukan pembahasan Penyertaan Modal Negara/PMN terhadap 12 (dua belas) BUMN dan BLU. Dalam pembahasan PMN, masih ada 6 (enam) BUMN dan BLU yang masih pending pembahasannya dan akan dijadwalkan pada Masa Sidang III yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. BPUI (Persero) - PT. PLN (Persero)

NO.	AKD	SUMMARY PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none">- LPEI- PPDPP- LPDP- LMAN